

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.¹ Ketahanan pangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa karena pemenuhan pangan merupakan hak asasi setiap manusia. Ketahanan pangan juga berperan sebagai salah satu pilar ketahanan nasional yang menunjukkan eksistensi kedaulatan suatu bangsa.²

Berdasarkan definisi di atas dapat dilihat bahwa tidak mudah bagi pemerintah untuk dapat mewujudkan tercapainya ketahanan pangan di Indonesia. Pemerintah harus dapat memenuhi tiga subsistem yang terdapat dalam sistem ketahanan pangan, yaitu:³

- a. Ketersediaan pangan dengan sumber utama penyediaan dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan;
- b. Keterjangkauan pangan oleh seluruh masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi; dan

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pasal 1.

² Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2017, hlm. 1.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, penjelasan.

- c. Pemanfaatan pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi, termasuk pengembangan keamanan pangan.

Ketentuan mengenai ketahanan pangan di Indonesia saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Salah satu ruang lingkup kebijakan ini adalah panganekaragaman pangan dan perbaikan gizi masyarakat. Panganekaragaman pangan merupakan upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumberdaya lokal untuk:⁴

- a. Memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- b. Mengembangkan usaha pangan; dan/atau
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Isu panganekaragaman pangan (diversifikasi pangan) menjadi sangat penting di Indonesia dikarenakan oleh masih membudayanya kebiasaan masyarakat untuk harus makan beras/nasi di setiap waktu makannya dan masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum memiliki pengetahuan cukup tentang pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

Untuk itu dalam rangka mengoptimalkan panganekaragaman pangan, Kementerian Pertanian Indonesia melalui Badan Ketahanan Pangan sejak tahun 2010 telah melaksanakan kegiatan Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP). Kegiatan ini merupakan perwujudan dari Peraturan Presiden

⁴ Ibid., pasal 25.

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Salah satu program dari kegiatan P2KP tersebut adalah optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan melalui konsep KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari). KRPL merupakan sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangannya secara intensif untuk dimanfaatkan menjadi sumber pangan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek potensi wilayah dan kebutuhan gizi warga setempat.⁵ Program KRPL ini pada intinya merupakan upaya memberdayakan masyarakat/kelompok wanita agar dapat memenuhi kebutuhan gizinya dengan menghasilkan pangan sendiri di tingkat keluarga atau rumah tangga melalui pemanfaatan pekarangannya. Kemudian hasil dari usaha pekarangan ini diutamakan untuk dikonsumsi oleh keluarga atau rumah tangga bersangkutan dan apabila berlebih dapat dibagikan/disumbangkan kepada anggota kelompok atau secara bersama-sama dijual oleh kelompok sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas konsumsi pangan, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Program KRPL ini bertujuan untuk memberdayakan rumah tangga dan masyarakat dalam penyediaan sumber pangan dan gizi melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan lahan sekitar. Selain itu program KRPL juga

⁵ Pedoman Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2017, hlm. 6.

bertujuan untuk dapat meningkatkan kesadaran, peran, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA).⁶

Optimalisasi pekarangan melalui konsep KRPL ini dilakukan melalui upaya pemberdayaan wanita/ kelompok masyarakat lainnya untuk budidaya pada lahan pekarangan maupun pengolahan hasilnya. Upaya ini dilakukan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan keluarga seperti aneka umbi, sayuran, buah, serta budidaya ternak dan ikan sebagai tambahan untuk memenuhi ketersediaan sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral bagi keluarga pada suatu lokasi kawasan perumahan/warga yang saling berdekatan.⁷

Secara garis besar, kegiatan KRPL di laksanakan dalam tiga tahapan umum yaitu tahap penumbuhan, tahap pengembangan dan tahap mandiri. Pada tahap penumbuhan dan tahap pengembangan pemerintah memberikan bantuan melalui dana dekonsentrasi di provinsi kepada kelompok yang terpilih untuk melaksanakan kegiatan KRPL, sedangkan di tahap mandiri kelompok masyarakat tersebut diharapkan sudah mampu berdiri sendiri dan dapat terus memanfaatkan pekarangannya secara kontinu.

Dalam pelaksanaannya, program KRPL ini dilaksanakan dengan adanya pendampingan oleh pendamping KRPL tingkat desa atau pendamping kelompok dan pendamping KRPL tingkat kabupaten/kota, serta dikoordinasikan bersama dengan aparat kabupaten/kota. Pendamping KRPL tingkat kabupaten/kota adalah

⁶ Ibid., hlm. 3.

⁷ Ibid.

penyuluh pertanian atau aparat yang menangani P2KP yang mengikuti pelatihan pendampingan KRPL dan bertugas untuk mendampingi serta membimbing kelompok sasaran kegiatan KRPL di kabupaten/kota. Sedangkan pendamping KRPL tingkat desa adalah penyuluh pertanian/ penyuluh Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP)/ penyuluh swadaya/ tokoh masyarakat yang mengikuti pelatihan pendamping KRPL di kabupaten/kota dan bertugas untuk mendampingi serta membimbing kelompok sasaran kegiatan KRPL di desa KRPL.⁸ Dalam hal ini aparat yang menangani kegiatan P2KP yang dimaksud adalah Dinas Pangan Kota Padang yang merupakan *leading sector* dalam implementasi program ini. Dan pendamping KRPL tingkat kabupaten/kota yang dimaksud adalah Kepala Seksi Penganekaraman Konsumsi Pangan Dinas Pangan Kota Padang. Sedangkan pendamping kelompok yang dimaksud adalah penyuluh pertanian yang berada dibawah tatanan Dinas Pertanian Kota Padang.

Program KRPL merupakan program pemerintah yang dilaksanakan secara nasional, termasuk di Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengimplementasikan program KRPL sejak tahun 2010 dan saat ini sudah tersebar di 19 Kabupaten/Kota⁹, salah satunya di Kota Padang. Implementasi program KRPL di Kota Padang sudah dimulai dari tahun 2012 dimana yang menjadi implementornya adalah Dinas Pangan Kota Padang dengan melibatkan Dinas Pertanian, pihak kecamatan dan kelurahan setempat.

⁸ Ibid., hlm. 5.

⁹ dinaspangan.sumbarprov.go.id/details/page/20, diakses pada tanggal 20 Februari 2017.

Kota Padang memiliki jumlah penduduk terbanyak jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk
1	Kab. Mentawai	88.692
2	Kab. Pesisir Selatan	457.285
3	Kab. Solok	368.691
4	Kab. Sijunjung	230.104
5	Kab. Tanah Datar	346.578
6	Kab. Padang Pariaman	411.003
7	Kab. Agam	484.288
8	Kab. Lima Puluh Kota	376.072
9	Kab. Pasaman	275.728
10	Kab. Solok Selatan	165.603
11	Kab. Dharmasraya	235.476
12	Kab. Pasaman Barat	427.295
13	Kota Padang	927.011
14	Kota Solok	68.602
15	Kota Sawahlunto	61.398
16	Kota Padang Panjang	52.422
17	Kota Bukittinggi	126.804
18	Kota Payakumbuh	131.819
19	Kota Pariaman	86.618

Sumber: Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2018 (data diolah peneliti)

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa Kota Padang memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih banyak dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya, yaitu berjumlah 927.011 jiwa. Memiliki jumlah penduduk yang banyak tentu saja akan mempengaruhi bagaimana upaya pemenuhan konsumsi pangan masyarakatnya. Kota Padang cenderung memiliki ketidakseimbangan yang paling signifikan dari pada Kabupaten/Kota lain dalam hal perkembangan produksi, ketersediaan, dan kebutuhan bahan pangan khususnya pada kelompok pangan sayur-sayuran. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.2 Perkembangan Produksi, Ketersediaan dan Kebutuhan Sayur-Sayuran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

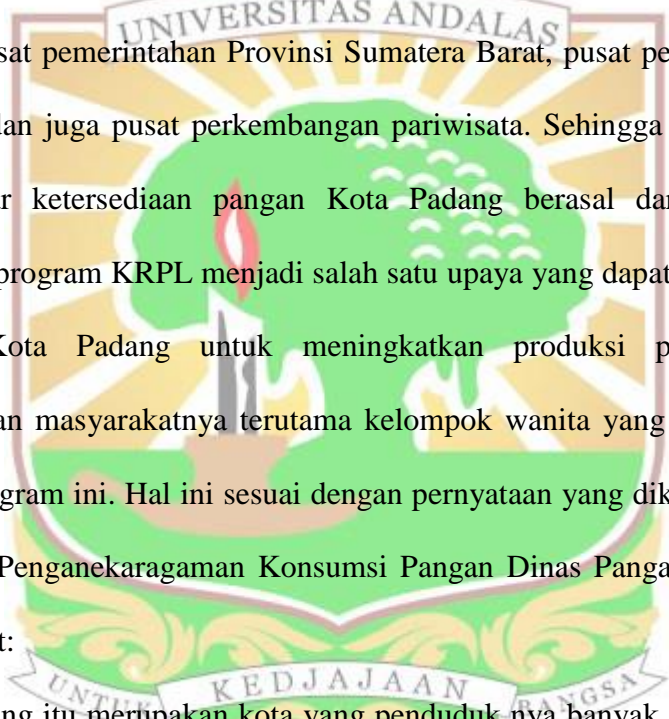
No	Kabupaten/Kota	Produksi (Ton)	Kebutuhan Non Konsumsi (Ton)	Tersedia (Ton)	Kebutuhan s/d Desember (Ton)	Perimbangan Surplus/Minus (Ton)
1	Kab. Mentawai	11	0	11	5.251	-5.240
2	Kab. Pes. Selatan	4.163	168	3.995	27.071	-23.077
3	Kab. Solok	239.553	9.654	229.899	21.827	208.073
4	Kab. Sijunjung	216	9	207	13.622	-13.415
5	Kab. Tanah Datar	99.731	4.019	95.712	20.517	75.195
6	Kab. Pd. Pariaman	1.050	42	1.008	24.331	-23.323
7	Kab. Agam	134.765	5.431	129.334	28.670	100.664
8	Kab. 50 Kota	25.918	1.044	24.873	22.263	2.610
9	Kab. Pasaman	1.420	57	1.363	16.323	-14.960
10	Kab. Solok Selatan	25.082	1.011	24.072	9.804	14.268
11	Kab. Dharmasraya	173	7	166	13.940	-13.774
12	Kab. Pasaman Barat	4.150	167	3.983	25.296	-21.313
13	Kota Padang	479	19	459	54.879	-54.420
14	Kota Solok	101	4	97	4.061	-3.964
15	Kota Sawahlunto	96	4	92	3.635	-3.543
16	Kota Pd. Panjang	4.965	200	4.765	3.103	1.662
17	Kota Bukittinggi	1.201	48	1.153	7.507	-6.354
18	Kota Payakumbuh	1.196	48	1.148	7.804	-6.656
19	Kota Pariaman	4.204	169	4.035	5.128	-1.093

Sumber: Data Olahan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 (komoditi: bawang merah, bawang putih, bawang daun, kentang, kubis, kembang kol, wortel, lobak, cabe besar, cabe rawit dan tomat)(data diolah peneliti)

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa Kota Padang memiliki angka minus yang paling besar dari pada Kabupaten/Kota lainnya dalam hal perkembangan produksi, ketersediaan dan kebutuhan sayur-sayuran, yaitu berjumlah -54.420 Ton. Hal ini disebabkan karena Kota Padang hanya bisa memproduksi sayur-sayuran tersebut dalam jumlah yang sedikit dan sangat signifikan jika dibandingkan dengan angka kebutuhannya mengingat jumlah

penduduknya yang banyak. Hal inilah yang menjadi landasan peneliti untuk memilih Kota Padang sebagai lokus penelitian ini.

Jumlah penduduk yang banyak otomatis menyebabkan besarnya angka kebutuhan bahan pangan yang harus disediakan oleh pemerintah daerahnya. Sedangkan luas lahan pertanian di Kota Padang tidak cukup untuk produksi pangan agar memenuhi kebutuhan warganya, ditambah dengan banyaknya terjadi alih fungsi lahan pertanian seiring dengan perkembangan Kota Padang yang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan juga pusat perkembangan pariwisata. Sehingga mengakibatkan sebagian besar ketersediaan pangan Kota Padang berasal dari luar daerah. Implementasi program KRPL menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan produksi pangan dengan memberdayakan masyarakatnya terutama kelompok wanita yang menjadi *target group* dari program ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dinas Pangan Kota Padang sebagai berikut:



“Padang itu merupakan kota yang penduduknya banyak, paling banyak malahan untuk di Provinsi Sumbar. Otomatis kebutuhan pangannya besar, sedangkan produksinya sedikit ditambah banyaknya alih fungsi lahan pertanian. Sehingga pangannya tergantung ke orang lain. Nah, sekarang kenapa tidak Padang sendiri yang menyediakan mulai dari rumah tangga.”¹⁰

Kemudian, alasan lain yang mendorong peneliti untuk memilih Kota Padang sebagai lokus penelitian adalah karena Kota Padang menjadi salah satu

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dinas Pangan Kota Padang, Helmi Suryati, pada tanggal 10 Juli 2018.

kota yang dijadikan percontohan dalam penerapan program KRPL di Sumatera Barat pada tahun 2011. Pada tahun itu percontohan penerapan program KRPL di Sumatera Barat ini dilaksanakan di tiga lokasi dalam tiga kota yaitu: (1) Kelurahan Tarantang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, (2) Kelurahan Payobasung Kota Payakumbuh, dan (3) Kelurahan Talawi Mudiak Kota Sawahlunto.¹¹ Hal ini dibenarkan oleh Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dinas Pangan Kota Padang sebagai berikut:

“Pernah. Waktu itu kan KRPL ini masih hangat-hangatnya, lalu BPTP meletakkan kegiatan itu salah satunya di Tarantang, Lubuk Kilangan. Menteri Pertanian yang melaunchingnya langsung pada waktu itu.”¹²

Berdasarkan laporan kondisi program KRPL oleh Dinas Pangan Kota Padang, hingga tahun 2018 terdapat 80 kelompok wanita yang telah terpilih menjadi kelompok pelaksana program KRPL di Kota Padang. Kelompok-kelompok tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Kelompok Pelaksana KRPL di Kota Padang 2012-2018

No	Kelompok	Tahun	Lokasi		Sumber Bantuan	Jml Angg Min
			Kelurahan	Kecamatan		
1	KWT Melati	2012	Batipuh Panjang	Koto Tengah	APBN	15
2	KWT Cempaka	2012	Batipuh Panjang	Koto Tengah	APBN	15
3	KWT Dahlia	2012	Batipuh Panjang	Koto Tengah	APBN	15
4	KWT Anggrek	2012	Batipuh Panjang	Koto Tengah	APBN	15
5	KWT Mawar	2012	Batipuh Panjang	Koto Tengah	APBN	15
6	KWT Peduli Umat	2012	Pasie Nan Tigo	Koto Tengah	APBN	15
7	KWT Mega Permai	2012	Padang Sarai	Koto Tengah	APBN	15
8	KWT Lubuk Lestari	2012	Lubuk Buaya	Koto Tengah	APBN	15

¹¹ Rachma Wahida, Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang, 2015, hlm. 4-5.

¹² Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dinas Pangan Kota Padang, Helmi Suryati, pada tanggal 10 Juli 2018.

9	KWT Mujahidah	2012	Sungai Sapih	Kuranji	APBN	15
10	KWT Mawar Andalas	2012	Andalas	Padang Timur	APBN	15
11	KWT Melati	2012	Kubu Dalam Parak Kerakah	Padang Timur	APBD Prov	10
12	Dasa Wisma Tanjung	2012	Jati	Padang Timur	APBD Prov	10
13	KWT Saiyo	2013	Koto Lalang	Lubuk Kilangan	APBN	30
14	KWT Reperta	2013	Batu Gadang	Lubuk Kilangan	APBN	30
15	KWT Pepaya	2013	Piai Tengah	Pauh	APBN	30
16	KWT Tunas Baru JBK	2013	Kurao Pagang	Nanggalo	APBN	30
17	KWT Lubuk Ramang	2013	Sei Lareh Lb. Minturun	Koto Tengah	APBN	30
18	KWT Anggrek	2013	Lubuk Lintah	Kuranji	APBN	30
19	KWT Bunga Tanjung	2013	Lambung Bukit	Pauh	APBN	30
20	KWT Mekar Sari	2013	Limau Manis Selatan	Pauh	APBN	30
21	KWT Anggrek	2013	Lubuk Lintah	Kuranji	APBN	30
22	KWT Lereng Saiyo	2013	Air Manis	Padang Selatan	APBN	30
23	KWT Askel	2013	KPIK	Koto Tengah	APBD Prov	15
24	KWT Bawah Duku	2013	KPIK	Koto Tengah	APBD Prov	15
25	KWT Nuansa Indah 3	2013	KPIK	Koto Tengah	APBD Prov	15
26	KWT Bunga Tanjung	2013	KPIK	Koto Tengah	APBD Prov	15
27	KWT Serumpun	2013	KPIK	Koto Tengah	APBD Prov	15
28	KWT Rawang Terapung	2013	Aie Pacah	Koto Tengah	APBD Prov	15
29	KWT Palarik City	2013	Aie Pacah	Koto Tengah	APBD Prov	15
30	KWT Mawar Saiyo	2013	Aie Pacah	Koto Tengah	APBD Prov	15
31	KWT Perdana City	2013	Aie Pacah	Koto Tengah	APBD Prov	15
32	KWT Mawar 4	2013	Aie Pacah	Koto Tengah	APBD Prov	15
33	KWT Gurun Teratai	2013	Padang Sarai	Koto Tengah	APBD Prov	15
34	KWT Melati Jaya	2014	Bungus Barat	Bungus TKB	APBN	30
35	KWT Melati	2014	Pampangan	Lubuk Begalung	APBN	30
36	KWT Alamanda Tarok	2014	Gunung Sarik	Kuranji	APBN	30
37	KWT Mozaik	2014	Mato Air	Padang Selatan	APBN	30
38	KWT Cempaka	2014	Kalumbuk	Kuranji	APBD Prov	15
39	KWT Permata Bunda	2014	Gunung Sarik	Kuranji	APBD Prov	15
40	KWT Surga Jaya	2014	Surau Gadang	Nanggalo	APBD Prov	15
41	KWT Taman Indah	2014	Padang Sarai	Koto Tengah	APBD Prov	15
42	KWT Saiyo	2014	Balai Gadang	Koto Tengah	APBD Prov	15
43	KWT Bakri Berkah	2014	Alai Parak Kopi	Padang Utara	APBD Prov	15
44	KWT KUBE Jihad	2014	Batang Kabung Ganting	Koto Tengah	APBD Prov	15
45	KWT Bunga Tulip	2014	Pasie Nan Tigo	Koto Tengah	APBD Prov	15
46	KWT Muslimah Sakato	2014	Batu Gadang	Lubuk Kilangan	APBD Prov	15
47	KWT Griya Cahaya	2014	Gunung Sarik	Kuranji	APBD Prov	15

48	KWT Bersatu Teguh	2014	Korong Gadang	Kuranji	APBD Prov	15
49	KWT Amanah	2014	Pasar Ambacang	Kuranji	APBD Prov	15
50	KWT Rosela Ungu	2014	Pegambiran Ampalu	Lubuk Begalung	APBD Prov	15
51	KWT KUBE Alhidayah	2014	Andalas	Padang Timur	APBD Prov	15
52	KWT Jati Bawah Buluh	2014	Jati	Padang Timur	APBD Prov	15
53	KWT Mata Air Sejahtera	2014	Mata Air	Padang Selatan	APBD Prov	15
54	KWT Rahaka Lestari	2014	Lubuk Buaya	Koto Tengah	APBD Prov	15
55	KWT Cempaka	2014	Limau Manis	Pauh	APBD Prov	15
56	KWT Arafah	2014	Bungus Timur	Bungus TKB	APBD Prov	15
57	KWT Mentari	2014	Lambung Bukit	Pauh	APBD Prov	15
58	KWT Banda Langik	2014	Balai Gadang	Koto Tengah	APBD Prov	15
59	KWT Bundo Tanjung	2014	Kalumbuk	Kuranji	APBD Prov	15
60	KWT Siriah Merah	2015	Teluk Kabung Tengah	Bungus TKB	APBN	15
61	KWT Bunda Mandiri	2015	Subarang Palinggam	Padang Selatan	APBN	15
62	KWT Wahan Green	2015	Kuranji	Kuranji	APBN	15
63	KWT Wak Ketok Saiyo	2015	Pisang	Pauh	APBN	15
64	Dasa Wisma Anyelir	2015	Lubuk Buaya	Koto Tengah	APBD Kota	20
65	Dasa Wisma Melati	2015	Rawang	Padang Selatan	APBD Kota	20
66	Kampung KB	2016	Gunung Pangilun	Padang Utara	APBD Kota	15
67	Kampung KB	2016	Parupuk Tabing	Koto Tengah	APBD Kota	15
68	Dasa Wisma Permata Anggrek II	2017	Balai Gadang	Koto Tengah	APBN	15
69	KWT Melati Pita	2017	Pasar Ambacang	Kuranji	APBN	15
70	KWT Taman Firdaus	2017	Padang Sarai	Koto Tengah	APBN	15
71	KWT Lidah Mertua	2017	Cengkeh Nan XX	Lubuk Begalung	APBN	15
72	KWT Pandan Harum	2017	Kampung Olo	Nanggalo	APBN	15
73	KWT Bukit Gado-Gado Indah	2018	Bukit Gado-Gado	Padang Selatan	APBN	30
74	KWT Kamboja	2018	KPIK	Koto Tengah	APBN	30
75	KWT Pasubar Saiyo	2018	Teluk Kabung Selatan	Bungus TKB	APBN	30
76	KWT Lurah Saiyo	2018	Kapalo Koto	Pauh	APBN	30
77	KWT Arai Pinang Sinawa	2018	Pegambiran Nan XX	Lubuk Begalung	APBD Kota	15
78	KWT Seroja Mandiri	2018	Tanah Sirah Piai Nan XX	Lubuk Begalung	APBD Kota	15
79	KWT Pagang Bersatu	2018	Kurao Pagang	Nanggalo	APBD Kota	15
80	Dasa Wisma Anggrek	2018	Kubu Marapalam	Padang Timur	APBD Kota	15

Sumber: Dinas Pangan Kota Padang (data diolah peneliti tahun 2018)

Berdasar tabel 1.3 di atas, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya terdapat kelompok-kelompok baru yang mulai melaksanakan Program KRPL. Kelompok-kelompok tersebut mendapatkan dana bantuan yang sumbernya berbeda-beda.

Ada kelompok yang mendapatkan bantuan dari APBN, ada yang mendapatkan bantuan dari APBD Provinsi Sumatera Barat, dan ada pula yang mendapatkan bantuan dari APBD Kota Padang. Selain itu, jumlah minimal anggota kelompok juga berbeda-beda dikarenakan jumlah bantuan yang dialokasikan untuk kelompok wanita tersebut juga berbeda-beda. Tahun yang mensyaratkan jumlah anggota minimal lebih besar biasanya mendapat bantuan yang lebih besar, begitu pula sebaliknya. Perbedaan pembiayaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4 Perkembangan Pembiayaan Program KRPL Kota Padang 2012-2018

Tahun	Jumlah/Bentuk Bantuan (Per Kelompok)		
	ABPN	ABPD Prov	APBD Kota
2012	Rp. 16.000.000	Rp. 10.000.000	-
2013	Rp. 47.000.000	Rp. 18.000.000	-
2014	Rp. 47.000.000	Rp. 20.000.000	-
2015	Rp. 15.000.000	-	Rp. 10.000.000
2016	Rp. 15.000.000	-	Rp. 10.000.000
2017	Rp. 15.000.000	-	-
2018	Rp. 50.000.000	-	Rp. 25.000.000

Sumber: Pedoman P2KP & Dinas Pangan Kota Padang (data diolah peneliti tahun 2018)

Tabel 1.4 di atas menunjukkan bahwa jumlah bantuan yang diberikan untuk program KRPL tidak sama setiap tahunnya. Perbedaan pembiayaan yang diberikan dikarenakan jumlah minimal anggota yang berbeda dan juga karena terdapat sedikit perbedaan pada kegiatannya. Pada tahun yang bantuannya lebih besar biasanya ada kegiatan untuk membuat kebun sekolah di sekolah yang ada di wilayah kelompok KRPL. Sedangkan untuk bantuan yang bersumber dari APBD baik itu dari provinsi atau kota juga sedikit berbeda dengan bantuan yang bersumber dari APBN. Bantuan yang bersumber dari APBD provinsi atau APBD

kota diberikan tidak dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk barang seperti bibit, rak-rak tempat bibit, dan perlengkapan lainnya senilai anggaran tersebut. Perbedaan pembiayaan ini juga tergantung dari bagaimana ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah baik itu dari pusat ataupun daerah. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dinas Pangan Kota Padang sebagai berikut:

“Bantuan dana yang diberikan kepada kelompok itu kan berbeda-beda. Tergantung dari bagaimana ketersediaannya. Kalau bantuannya agak besar biasanya jumlah anggota kelompok minimal yang diminta juga lebih banyak, kegiatannya juga agak lebih dari yang bantuannya kecil. Biasanya kalau yang bantuannya agak besar ada melibatkan pihak sekolah di wilayahnya untuk pembuatan kebun sekolah.”¹³

Terkait dengan bantuan yang diberikan pemerintah tersebut, dalam pelaksanaannya bantuan hanya diberikan pada tahun pertama kelompok mulai melaksanakan kegiatan KRPL dan jika memenuhi syarat juga diberi bantuan pada tahun kedua, akan tetapi setelah itu kelompok-kelompok KRPL harus bisa melanjutkannya secara mandiri. Mengingat pada dasarnya program KRPL merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat, sehingga diharapkan kelompok-kelompok KRPL tersebut dapat melaksanakannya secara berkelanjutan walaupun sudah tidak ada lagi bantuan dari pemerintah.

Setelah melakukan survey awal ke lapangan, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan KRPL ini dilaksanakan dengan mengacu kepada peraturan yang berbeda-beda setiap tahunnya. Pemerintah mengeluarkan peraturan yang baru setiap tahunnya yang berisikan tentang petunjuk teknis (juknis) atau pedoman

¹³ Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dinas Pangan Kota Padang, Helmi Suryati, pada tanggal 10 Juli 2018.

untuk pelaksanaan program KRPL di tahun tersebut. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan jumlah dana bantuan untuk kelompok baru setiap tahunnya dan juga bentuk kegiatannya yang juga sedikit berbeda. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Pangan Kota Padang sebagai berikut:

“Pedoman yang dikeluarkan dari pusat itu beda-beda setiap tahunnya. Karena beda-beda jumlah dana bantuannya dan kadang juga kegiatannya juga beda walaupun sedikit saja bedanya”¹⁴

Selain itu peneliti juga menemukan fenomena yang menunjukkan adanya indikasi kurangnya koordinasi Dinas Pangan Kota Padang yang berperan sebagai *leading sector* terhadap Dinas Pertanian Kota Padang yang berperan sebagai instansi terkait dalam implementasi program KRPL ini. Hanya belakangan ini pihak Dinas Pangan berkoordinasi dengan mengadakan rapat dengan Dinas Pertanian. Sebelumnya pihak Dinas Pangan biasanya langsung menghubungi UPT kecamatan atau langsung kepada penyuluh pertanian. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Kota Padang sebagai berikut:

“Sebelum-sebelumnya Dinas Pangan biasanya langsung menghubungi UPT kecamatan atau langsung ke penyuluh saja. Cuma baru-baru ini lah ada rapat-rapat gitu dengan Dinas Pertanian.”¹⁵

Terkait dengan masalah koordinasi ini peneliti juga menemukan adanya kelompok tahun 2015 yang terlambat mendapatkan pendamping kelompok, kelompok tersebut baru mendapatkan pendamping setelah mulai menjalankan

¹⁴ Hasil wawancara dengan Plt. Kepala Dinas Pangan Kota Padang, Syahril, pada tanggal 25 Juli 2018.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Kota Padang, Rita Yendri Yeni, pada tanggal 6 September 2018.

program KRPL. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Kelompok Dasa Wisma Anyelir sebagai berikut:

“Kami kan mulai dapat bantuan di bulan Agustus 2017, ketika di awal-awal itu kami belum ada pendamping. Baru ada pendamping itu ketika sudah di pertengahan lebih lah kami menjalankan program. Di awal 2016 waktu itu baru ada pendamping.”¹⁶

Pendamping Kelompok Dasa Wisma Anyelir tersebut juga membenarkan dengan pernyataan sebagai berikut:

“Ketika dasa wisma anyelir dapat bantuan untuk KRPL di 2015 itu saya belum jadi pendamping kelompoknya, karena saya bukan PPL di wilayah itu. Waktu itu PPL disitu pak Yos tapi beliau juga tidak ada ditunjuk menjadi pendamping.”¹⁷

Selain itu fenomena lain yang peneliti temukan di lapangan adalah masyarakat ternyata menilai bahwa program ini dapat memberikan manfaat kepada mereka. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan dari Kelompok Wanita Tani Siriah Merah sebagai berikut:

“Sayur yang kita beli itu biasanya kan pakai pestisida atau disemprot bahan-bahan kimia lain gitu, tapi kalau kita tanam sendiri kan nggak mungkin kita kasih pula. Jadi kita bisa dapat sayuran yang lebih terjamin lah kesehatannya.”¹⁸

Manfaat lain juga dikemukakan oleh Kelompok Dasa Wisma Melati sebagai berikut:

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Dasa Wisma Anyelir, Defi Trisni, pada tanggal 30 November 2017.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Pendamping Kelompok Dasa Wisma Anyelir, Meriza Yuliana, pada tanggal 23 November 2017.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bendahara Kelompok Wanita Tani Siriah Merah, Yulianita, pada tanggal 28 November 2017.

“Sejak ada menanam sayur-sayur sendiri, tidak perlu lagi beli. Tinggal ambil saja di pekarangan. Bahan-bahan yang biasa untuk masak tiap hari juga tinggal ambil. Terus tetangga yang melihat juga jadi termotivasi. Bahkan kami sampai menjual bibit sampai ke kecamatan lain.”¹⁹

Dari kutipan-kutipan wawancara di atas dapat dilihat bahwa penerapan program KRPL dapat memberikan manfaat kepada masyarakat mulai dari terpenuhinya pangan yang sehat di keluarga sendiri, memotivasi tetangga yang belum melaksanakan, bahkan sampai bisa menambah penghasilan. Meskipun demikian, ternyata kondisinya sekarang malah banyak kelompok-kelompok yang sudah kurang aktif atau malah tidak aktif lagi melaksanakan program KRPL.²⁰

Pada prinsipnya implementasi kebijakan merupakan suatu proses dimana implementor berupaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dalam tahap perumusan kebijakan itu tidak akan bisa tercapai tanpa adanya implementasi. Walaupun kebijakan sudah dirumuskan seideal mungkin, akan tetapi jika tidak diimplementasikan kebijakan tersebut hanya akan menjadi tumpukan arsip yang tersimpan di kantor-kantor pemerintahan. Oleh karena itulah implementasi menjadi tahap yang krusial dalam kebijakan publik. Riant Nugroho memandang bahwa rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, dan 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat karena disini masalah-masalah yang

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Dasa Wisma Melati, Asnidar, pada tanggal 5 Oktober 2018.

²⁰ Laporan Kondisi KRPL Tahun 2016 oleh Dinas Pangan Kota Padang.

kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan.²¹ Dalam proses implementasi program KRPL ini, tentu saja program ini tidak berjalan begitu saja tanpa adanya masalah-masalah yang ditemui di lapangan. Program ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung yang menjadi penentu keberhasilan implementasinya.

Van Meter dan Van Horn mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi sebuah kebijakan atau program salah satunya tergantung pada bagaimana kejelasan standar dan sasaran kebijakan atau program tersebut. Implementasi program KRPL ini dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan/Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang pedoman pelaksanaan program KRPL yang dikeluarkan setiap tahunnya. Berdasarkan pedoman-pedoman tersebut dijelaskan bahwa implementasi program KRPL dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan yang secara umum mekanismenya terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:²²

1. Pembentukan kelompok.
2. Identifikasi kebutuhan.
3. Penyusunan rencana kegiatan.
4. Sekolah Lapang (SL) dan pelatihan.
5. Pembuatan dan pengelolaan kebun bibit.
6. Pengembangan demplot kelompok.
7. Penataan lingkungan kawasan .

²¹ Riant Nugroho, *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hlm. 625-626.

²² Panduan Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2017, hlm. 8.

Tahapan-tahapan tersebut juga disertai dengan adanya pemantauan dan evaluasi berjenjang yang dilakukan secara berkala. Tahapan-tahapan ini lah yang menunjukkan bagaimana program KRPL diimplementasikan di Kota Padang.

Selain faktor standar dan sasaran kebijakan, keberhasilan implementasi suatu kebijakan atau program juga tidak akan bisa lepas dari adanya pengaruh sumber daya yang terlibat didalamnya, termasuk sumber daya finansial. Terkait hal ini peneliti menemukan fenomena adanya perbedaan mengenai bantuan yang diberikan kepada kelompok sesuai dengan tabel 1.3 dan tabel 1.4 yang telah peneliti paparkan sebelumnya. Ada kelompok yang didanai dari APBN, ada yang didanai dari APBD Provinsi Sumatera Barat, dan ada pula kelompok yang didanai dari APBD Kota Padang. Selain itu, bantuan juga ada yang berupa dana dan ada yang berupa barang.

Terkait dengan masalah finansial ini peneliti juga menemukan adanya perbedaan honor yang diberikan kepada pendamping kelompok yang didanai APBN dengan pendamping kelompok yang didanai APBD Provinsi Sumatera Barat dan pendamping kelompok yang didanai APBD Kota Padang. Berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan yang dikeluarkan Kementerian Pertanian, penyuluh yang menjadi pendamping kelompok diberi honor sebesar Rp.350.000 untuk 10 bulan dalam satu tahun. Honor ini diberikan setelah pendamping menyerahkan laporan perkembangan program KRPL di kelompok yang didampingi. Hal ini dibenarkan oleh pendamping Kelompok Wanita Tani Lurah Saiyo sebagai berikut:

“Honor ada diberikan dari pihak Dinas Pangan Kota Padang selama tahun berjalan program ini. Honor nya itu dibayarkan untuk 10 bulan pertahun dengan ketentuan diberikan setelah kita membuat laporan perkembangan program.”²³

Hal senada juga dikemukakan oleh pendamping Kelompok Wanita Tani

Siriaih Merah sebagai berikut:

“Untuk jadi pendamping KRPL ini kami ada dikasih honor Rp.350.000 per bulan. Honor ini ada dikasih selama kelompok masih dapat dana bantuan. Setelah itu tidak ada lagi. Tapi kami tetap masih harus mendampingi kelompok.”²⁴

Dalam pengimplementasian program KRPL ini, kelompok dapat memperoleh dana bantuan lagi di tahun kedua yang merupakan tahap pengembangan asalkan kelompok dapat memenuhi persyaratan. Namun jika kelompok tidak mampu melanjutkan maka kelompok tersebut tidak diberikan dana bantuan lagi. Dan pendamping kelompok juga mendapatkan honor di tahun kedua jika kelompoknya masih menerima dana bantuan. Setelah tahun kedua masuklah pada tahap mandiri dimana tidak ada lagi dana bantuan untuk kelompok dan juga honor bagi pendamping. Akan tetapi, para pendamping masih harus memonitor bagaimana kelanjutan program KRPL secara berkala.

Sedangkan pendamping dari kelompok yang didanai APBD Provinsi Sumatera Barat dan kelompok yang didanai APBD Kota Padang tidak mendapatkan honor. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dinas Pangan Kota Padang sebagai berikut:

²³ Hasil Wawancara dengan Pendamping Kelompok Wanita Tani Lurah Saiyo, Nova Fitri, pada tanggal 12 Desember 2018.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Pendamping Kelompok Wanita Tani Siriaih Merah, Bobby S, pada tanggal 23 November 2017.

“Untuk kelompok yang dapat bantuan dari APBD Provinsi dan APBD Kota itu ada juga pendampingnya, tapi tidak pakai honor.”²⁵

Pendamping dari Kelompok Dasa Wisma Melati yang merupakan salah satu kelompok yang didanai dari APBD juga menyampaikan hal yang senada sebagai berikut:

“Kalau untuk pendamping kelompok yang dibantu APBN ada honorinya, tapi kalau yang dari APBD Kota yang saya dampingi sekarang ini tidak ada.”²⁶

Keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Sesuai dengan petunjuk teknis P2KP bahwasanya program KRPL ini dilaksanakan dengan adanya pendampingan dari penyuluh pertanian. Terkait hal ini Dinas Pangan Kota Padang mengalami keterbatasan tenaga yang disebabkan oleh penyuluh pertanian ini bekerja di bawah Dinas Pertanian Kota Padang, sehingga otomatis pihak Dinas Pangan harus bekerjasama dengan Dinas Pertanian tersebut untuk melibatkan penyuluh pertanian dalam mengimplementasikan program KRPL ini. Hal ini juga dikemukakan oleh Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dinas Pangan Kota Padang sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan kami keterbatasan tenaga, soalnya untuk teknis ke lapangan kan dibutuhkan penyuluh pertanian. Sedangkan penyuluh pertanian itu di Dinas Pertanian, jadi kami harus mengharapkan dari SKPD yang berbeda.”²⁷

²⁵ Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dinas Pangan Kota Padang, Helmi Suryati, pada tanggal 10 Juli 2018.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Pendamping Kelompok Dasa Wisma Melati, Ir. Azman, pada tanggal 23 Maret 2017.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dinas Pangan Kota Padang, Helmi Suryati, pada tanggal 10 Juli 2018.

Kemudian Van Meter dan Van Horn juga mempertimbangkan faktor disposisi implementor terhadap keberhasilan suatu kebijakan atau program. Adanya fenomena-fenomena mengenai sumber daya yang telah peneliti kemukakan di atas tentu saja sedikit banyak bisa mempengaruhi bagaimana disposisi implementor dalam pelaksanaan program KRPL ini. Terkait dengan disposisi implementor ini, peneliti menemukan indikasi kurangnya komitmen dari pendamping kelompok dalam melaksanakan proses pendampingan terhadap kelompok KRPL yang didampingi. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Kota Padang sebagai berikut:

“Kendalanya selama ini kan banyak penyuluh yang setengah hati, karena kadang penyuluh kerja di KRPL ini tidak ada surat tugas dari Dinas Pertanian. Sehingga mereka pun tidak dapat kredit poin walaupun mereka dapat honor dari Dinas Pangan. Kemudian sebenarnya kan pokok kerja mereka itu disini.”²⁸

Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dinas Pangan Kota Padang sebagai berikut:

“Kan penyuluh pertanian yang mendampingi kelompok itu berada di Dinas Pertanian. Otomatis kami nomor dua, tentu kerjanya di SKPD dia sendiri di dahulukan. Mungkin itulah yang jadi salah satu penyebab kurang optimalnya.”²⁹

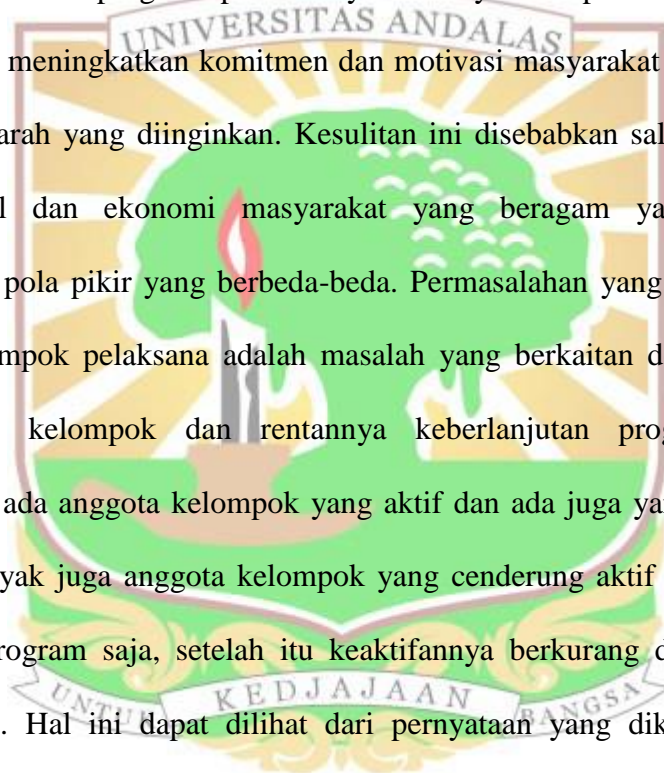
Kutipan-kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa terdapat kendala dari pihak penyuluh pertanian yang bertugas mendampingi kelompok KRPL. Hal ini dikarenakan tenaga pendamping tersebut bukan lah personel yang berasal dari Dinas Pangan Kota Padang melainkan dari SKPD lain yang terkait, yaitu Dinas

²⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Kota Padang, Rita Yendri Yeni, pada tanggal 6 September 2018.

²⁹ Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dinas Pangan Kota Padang, Helmi Suryati, pada tanggal 10 Juli 2018.

Pertanian Kota Padang. Penyuluh pertanian tersebut juga memiliki banyak tugas yang harus diselesaikan dari dinas tersebut sehingga sedikit banyak hal ini dapat mempengaruhi kinerja penyuluh dalam proses pendampingan kelompok KRPL.

Variabel lain yang juga ikut mempengaruhi kinerja implementasi suatu kebijakan atau program adalah kondisi sosial, ekonomi dan politik. Terkait dengan hal ini, peneliti menemukan permasalahan seperti yang sering muncul pada kebijakan atau program pemberdayaan masyarakat pada umumnya, yaitu sulitnya untuk meningkatkan komitmen dan motivasi masyarakat serta mengubah pola pikir ke arah yang diinginkan. Kesulitan ini disebabkan salah satunya oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang beragam yang tentu akan menghasilkan pola pikir yang berbeda-beda. Permasalahan yang muncul hampir di setiap kelompok pelaksana adalah masalah yang berkaitan dengan keaktifan para anggota kelompok dan rentannya keberlanjutan program. Hal ini menyebabkan ada anggota kelompok yang aktif dan ada juga yang kurang aktif. Selain itu banyak juga anggota kelompok yang cenderung aktif pada saat tahun berjalannya program saja, setelah itu keaktifannya berkurang dan motivasinya juga menurun. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dinas Pangan Kota Padang sebagai berikut:



“Banyak anggota kelompok itu yang kurang aktif lagi atau sudah tidak jalan lagi sekarang. Misalnya kelompok itu anggotanya 30 orang, paling-paling cuma 10 orang yang masih menjalankan atau malah cuma tinggal berdua. Kadang-kadang mereka hanya mengharapkan dari bantuan pemerintah. Tapi masyarakat yang merasa itu kebutuhannya, mereka tetap melanjutkannya.”³⁰

Kelompok Wanita Tani Siriah Merah juga membenarkan hal ini dengan pernyataan sebagai berikut:

“Anggota sudah tidak terlalu aktif lagi sekarang. Maksudnya sudah kurang rajin mengolah baik itu pekarangannya ataupun kebun bibit bersama. Kalau dulu iya banyak yang aktif, Cuma sekarang sudah kurang apalagi sudah berapa tahun kan.”³¹

Dari kutipan-kutipan wawancara di atas dapat dilihat bahwa rata-rata tidak seluruh anggota kelompok yang aktif dalam melaksanakan pemanfaatan pekarangannya melalui program KRPL ini. Apalagi ketika sudah di tahap lanjutan, motivasi masyarakat biasanya cenderung berkurang.

Melihat beberapa fenomena di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam bagaimana implementasi program KRPL di Kota Padang dengan menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter & Van Horn. Peneliti memilih untuk menggunakan teori ini karena teori ini memandang implementasi secara *top down*, sesuai dengan program KRPL yang juga merupakan program yang bersifat *top down*. Teori ini juga sesuai dengan permasalahan yang peneliti kaji, karena dari fenomena-fenomena yang peneliti

³⁰ Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dinas Pangan Kota Padang, Helmi Suryati, pada tanggal 10 Juli 2018.

³¹ Hasil wawancara dengan Bendahara Kelompok Wanita Tani Siriah Merah, Yulianita, pada tanggal 28 November 2017.

kemukakan di atas terlihat ada pengaruh dari variabel-variabel yang dikemukakan oleh Van Meter & Van Horn.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu administrasi publik, karena dalam penelitian ini terdapat kajian-kajian tentang ilmu administrasi publik terutama pada konsentrasi kebijakan publik, yaitu tentang proses implementasi sebuah program pemerintah terkait dengan ketahanan pangan.

Selain itu penelitian ini juga berfungsi sebagai bahan referensi atau sebuah acuan yang relevan bagi penelitian selanjutnya untuk meneliti permasalahan yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangsih pemikiran dalam rangka penyempurnaan konsep maupun untuk meningkatkan pengetahuan-pengetahuan bagaimana proses suatu kebijakan publik terutama pada tahap implementasi kebijakan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna baik bagi pemerintah Kota Padang khususnya bagi Dinas Pangan Kota Padang selaku implementor utama, maupun bagi kelompok KRPL selaku kelompok sasaran sebagai bahan pertimbangan ke depannya agar bisa meningkatkan kinerja pelaksanaan program KRPL di Kota Padang.

